

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2011:9). Oleh karena itu, tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi indikator keberhasilan pembangunan yang dijadikan pemerintah sebagai sasaran utama dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian. Salah satunya adalah tingkat pengangguran. Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat kondisi suatu negara, apakah perekonomiannya berkembang atau lambat atau bahkan mengalami kemunduran. Dalam suatu negara perekonomian tentu ingin meningkatkan perkembangan dan kemajuan yang signifikan, mundur atau majunya suatu negara dapat dilihat dari perekonomiannya. Kebijakan pembangunan ditunjukkan sekali pada maksimisasi pertumbuhan GNP melalui suatu proses akumulasi modal dan industrialisasi.

Syahputra (2019), mengatakan bahwa pembangunan berhasil apabila mampu meningkatkan kesejahteraan dalam arti luas. Pengaruh kualitas penduduk yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya penduduk yang berkualitas tidak akan menjadi beban dalam pembangunan. Tujuan utama pembangunan adalah terciptanya penyediaan lapangan kerja dan menciptakan pertumbuhan ekonomi dalam rangka menyejahterakan masyarakat secara umum.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat dalam jangka panjang (Sukirno, 2013: 61).

Menurut Badan Pusat Statistik (2016), pengangguran disebabkan oleh tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya, hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja. Pengangguran di Indonesia menjadi masalah yang serius hal ini di karena kan pengangguran secara terus menerus membengkak.

Adhi (2020), mengatakan bahwa peningkatan pengangguran di Indonesia tahun 2019-2020 menjadi masalah yang serius hal ini di karena kan pandemi Covid-19 yang berdampak buruk pada perekonomian hingga ketenagakerjaan. Pandemi Covid-19 tidak hanya menimbulkan korban jiwa, pandemi juga menyebabkan Indonesia masuk jurang resesi pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 3,49 persen pada kuartal III 2020. Hal ini tentunya berpengaruh pada tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Pasalnya, ada banyak sekali perusahaan yang mengalami kebangkrutan hingga akhirnya melakukan PHK massal. Sebelum krisis ekonomi tahun 1997, tingkat pengangguran di Indonesia pada umumnya di bawah 5 persen dan pada tahun 1997 sebesar 4,68 persen. Tingkat pengangguran sebesar 4,68 persen masih merupakan pengangguran dalam skala yang wajar.

Menurut Sandono (2008), dalam negara maju tingkat pengangguran biasanya berkisaran 2-3 persen, hal ini disebut tingkat pengangguran alamiah. Tingkat pengangguran alamiah merupakan suatu tingkat pengangguran yang

alamiah dan tak mungkin dihilangkan. Artinya jika pengangguran paling tinggi 2-3 persen itu berarti bahwa perekonomian dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*).

Tabel 1.1
Persentase Tingkat Pengangguran di Indonesia Bulan Februari dan Agustus Tahun 2014-2020

| Tahun | Februari | Agustus |
|-------|----------|---------|
| 2014 | 7.15 | 7.42 |
| 2015 | 7.45 | 7.56 |
| 2016 | 7.02 | 7.03 |
| 2017 | 7.01 | 7.04 |
| 2018 | 6.87 | 7.05 |
| 2019 | 6.82 | 7.05 |
| 2020 | 6.88 | 7.07 |

Sumber: BPS (2014-2020)

Tabel 1.1 persentase tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2020 mengalami fluktuatif yang di mana pada Agustus 2015 mengalami peningkatan pengangguran yang tinggi sebesar 7.56 persen dan pada Februari 2016 mengalami penurunan sebesar 7.02 persen dan kembali mengalami kenaikan pada Agustus 2016 sebesar 7.03 persen hingga pada Agustus 2020 mencapai 7.07 persen.

Menurut Sandono (2008), pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks untuk dibahas dan merupakan isu penting, karena dapat dikaitkan dengan beberapa indikator. Indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhi tingkat pengangguran antara lain inflasi, pengeluaran pemerintah, PDRB serta besarnya upah yang berlaku. Apabila di suatu negara pertumbuhannya mengalami kenaikan, diharapkan akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran, hal ini diikuti dengan tingkat upah. Jika tingkat upah naik akan berpengaruh pada

penurunan jumlah pengangguran pula. Sementara itu pada pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa akan mendorong terciptanya lapangan kerja dalam upaya menyediakan barang publik secara tidak langsung akan membuka kesempatan kerja.

Menurut Khairul (2015), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pemerintah tentu saja tidak hanya melakukan pengeluaran, tetapi juga memperoleh penerimaan dan pengeluaran pemerintah dimasukkan dalam suatu konsep terpadu mengenai pendapatan dan belanja negara. Peranan ini dapat dilakukan dalam bentuk investasi secara langsung maupun tidak langsung.

Tabel 1.2
Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Ribuan Rupiah)
Tahun 2014 - 2020

| Tahun | Pengeluaran Pemerintah |
|-------|------------------------|
| 2014 | Rp. 261.712.905.009,00 |
| 2015 | Rp. 277.595.813.274,00 |
| 2016 | Rp. 297.851.059.459,00 |
| 2017 | Rp. 349.611.545.050,00 |
| 2018 | Rp. 370.944.523.414,00 |
| 2019 | Rp. 396.055.585.953,00 |
| 2020 | Rp. 407.167.366.629,00 |

Sumber: BPS 2014–2020

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia tahun 2014 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan, yang di mana peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2020 dengan kenaikan sebesar 407.167.366.629.

Menurut Sukirno (2006), pengeluaran pemerintah merupakan konsumsi barang yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi dan kegiatan pembangunan. Pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa akan mendorong terciptanya lapangan kerja dalam upaya menyediakan barang publik secara tidak langsung akan membuka kesempatan kerja. Lapangan kerja yang tersedia akibat aktivitas pemerintah akan dipengaruhi oleh jenis pengeluaran. Adapun kebijakan pemerintah dalam usahanya untuk menanggulangi masalah pengangguran melalui kebijakan fiskal, dalam hal ini pengeluaran pemerintah yang ekspansif tampaknya belum mendatangkan hasil yang signifikan, pengeluaran pemerintah yang setiap tahunnya mengalami kenaikan ternyata diiringi pula oleh bertambahnya jumlah pengangguran.

Golin (2001), mengatakan bahwa rasio merupakan satu angka yang dibandingkan dengan angka lain sebagai suatu hubungan kemudian dinyatakan dalam persentase angka itu sendiri yang menunjukkan hubungan secara matematis antara suatu jumlah dan jumlah yang lain. Berdasarkan kedua variabel pengeluaran pemerintah dan PDRB, maka dalam penelitian ini menggunakan total rasio pengeluaran pemerintah dan PDRB yang kemudian dijadikan variabel untuk menganalisis tingkat pengangguran di Indonesia.

Menurut Sari (2015), semakin tingginya tingkat inflasi yang terjadi dapat berakibat pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun, sehingga akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran. Inflasi merupakan permasalahan semua negara di dunia. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu indikator untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang

dihadapi suatu negara. Menurut Safir (2019), negara yang perekonomiannya baik, memiliki tingkat inflasi berkisar antara 2 - 4 persen per tahun. Dengan persentase sebesar itu, dapat dikatakan inflasi yang rendah. Negara dapat dikatakan memiliki inflasi yang tinggi jika tingkat inflasi berkisar lebih dari 30 persen.

Natsir (2014), mengatakan bahwa inflasi yang sangat tinggi disebut hiper inflasi (*hyper inflation*). Jika suatu negara mengalami hiper inflasi bisa dipastikan jumlah pengangguran di negara tersebut akan bertambah secara drastis. Karena dengan kenaikan harga-harga di semua sektor, maka perusahaan-perusahaan akan mengambil kebijakan mengurangi biaya untuk memproduksi barang atau jasa dengan cara mengurangi pegawai atau tenaga kerja. Bagi masyarakat umum, inflasi menjadi perhatian karena inflasi langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup, dan bagi dunia usaha laju inflasi merupakan faktor yang sangat penting dalam membuat berbagai keputusan. Oleh karena itu, inflasi sangat berkaitan erat dengan tingkat pengangguran (Sukirno, 2011: 165).

Menurut Qomariyah (2013), inflasi merupakan meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Tingginya tingkat inflasi yang terjadi maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi sehingga akan terjadi peningkatan pengangguran. Inflasi juga memiliki hubungan positif terhadap pengangguran karena inflasi mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat serta menurunkan jumlah barang dan jasa yang diminta oleh masyarakat dan juga akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Keadaan ini yang akan

membuat perusahaan mengurangi jumlah permintaan tenaga kerja yang berdampak pada berkurangnya kesempatan kerja sehingga menyebabkan pengangguran semakin meningkat.

Menurut Badan Pusat Statistik (2016), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi serta menggambarkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Jumlah angkatan kerja yang ada di suatu perekonomian juga dapat dipengaruhi oleh angka PDRB daerah tersebut, dengan harapan apabila PDRB terus bertambah, maka jumlah total output yang dihasilkan pada seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah akan meningkat sehingga jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan semakin tinggi dan pengangguran yang ada bisa ditekan.

Arsyad (2010), mengatakan bahwa adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin rendah tingkat penganggurannya, dan sebaliknya, penurunan tingkat pengangguran di setiap tahunnya di sebabkan ketika tingkat pertumbuhan riil tinggi, sedangkan tingkat pengangguran meningkat di setiap tahunnya ketika tingkat pertumbuhan riil tetap rendah atau bahkan negatif. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang meningkat diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di wilayah tersebut. Kenaikan PDRB kemungkinan dapat meningkatkan kapasitas produksi, hal tersebut mengindikasikan bahwa penurunan

PDRB suatu daerah dapat dikaitkan dengan tingginya jumlah pengangguran pada daerah tersebut.

Permasalahan selanjutnya dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah upah. Menurut Mankiw (2000), upah yang rendah secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada tingkat pengangguran yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena penambahan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya. Upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Selain itu, upah juga merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya (Effendy, 2018: 119).

Ryan *et al.* (2017), mengatakan bahwa upah merupakan hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja atau pengusaha kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan atas jasa yang telah dilakukan. Permasalahan dasar yang berkaitan dengan upah sama di setiap negara, akan tetapi memiliki cara penanganannya dan peraturannya berbeda antar negara. Pekerja atau buruh dan keluarganya sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu para pekerja dan serikat pekerja atau serikat buruh selalu mengharapkan upah yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya (Yulmardi, 2008: 30).

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat upah minimum Provinsi di Indonesia tahun 2014 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan, yang di mana peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2019 dan tahun 2020 dengan kenaikan sebesar 216.748.00.

Tabel 1.3
Rata-rata Tingkat Upah Minimum Provinsi di Indonesia
Tahun 2014-2020

| Upah Tahun | Tingkat Upah (Rp) |
|------------|-------------------|
| 2014 | 1,584,391.00 |
| 2015 | 1,790,342.00 |
| 2016 | 1,997,819.00 |
| 2017 | 2,074,251.00 |
| 2018 | 2,268,874.00 |
| 2019 | 2,455,662,00 |
| 2020 | 2,672,370.00 |

Sumber: BPS (2014-2020)

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tingkat pengangguran di antaranya upah, inflasi, rasio pengeluaran pemerintah dalam PDRB. Pengangguran di Indonesia menjadi permasalahan yang cukup kompleks dikarenakan belum ada penurunan yang konsisten dari tahun ketahun seperti halnya dari tahun 2014 hingga tahun 2020 persentase pengangguran masih fluktuatif. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2014-2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada sub bab latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh rasio pengeluaran pemerintah dalam PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2014-2020?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2014-2020?
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2014-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio pengeluaran pemerintah dalam PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2014-2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh upah minimum provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2014-2020.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2014-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Bagi Pemerintah hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dalam membuat kebijakan terkait dengan ketenagakerjaan.
2. Bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan tambahan informasi dalam ilmu dan bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya di bidang yang sama.

1.5 Hipotesis

Mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan, maka hasil hipotesis sementara dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga bahwa rasio pengeluaran pemerintah dalam PDRB memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2014-2020.
2. Diduga bahwa Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2014-2020.
3. Diduga bahwa Inflasi berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2014-2020.

1.6 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibuat dan terbagi menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan menjadi landasan awal dalam kerangka berpikir. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan pengaruh peran pemerintah dalam mengendalikan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia, penelitian terdahulu dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, objek penelitian, jenis, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, variabel penelitian serta model dan teknik analisis data penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi daerah penelitian, analisis data, hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan atas seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya serta mengajukan saran yang dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.